1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Perkembangan Harga Bahan Pokok Penting di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Bulan Januari Tahun 2026 ialah:

Pada Bulan Januari Tahun 2026, harga beras tidak mengalami kenaikan dapat dikatakan stabil dimana harga untuk beras medium sebesar Rp. 12.500,- sedangkan untuk beras premium sebesar Rp. 14.000,- (Empat Belas Ribu Rupiah).

Harga Cabai merah Keriting tidak mengalami kenaikan bahkan cenderung menurun rata-rata harga dalam bulan Januari sebesar Rp. 30.000,-. Sedangkan harga cabai rawit merah mengalami fluktuasi harga. Harga kebutuhan pokok lainnya dalam keadaan stabil tidak mengalami kenaikan yang signifikan.

Perkembangan harga bahan pokok pada bulan Februari Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dimana harga cabai merah keriting tidak mengalami kenaikan bahkan cenderung menurun harga rata-rata Rp 30.000,- sedangkan cabe rawit merah mengalami kenaikan cukup signifikan diharga Rp 60.000,-.

Harga telur ayam dan daging ayam ras mulai mengalami kenaikan setiap minggunya rata-rata mengalami kenaikan berkisar Rp. 1.000,-. Bahan kebutuhan pokok lainnya tidak mengalami kenaikan harga yang signifikan atau stabil.

Perkembangan harga bahan pokok pada bulan Maret Kabupaten Penukal Abab Lematang llir dimana harga cabai merah keriting mengalami kenaikan harga pada setiap minggunya

berkisar Rp 10.000,-, sedangkan cabai rawit merah mengalami kenaikan dikisaran harga Rp 10.000,-

Harga telur ayam dan harga daging ayam ras tidak mengalami kenaikan signifikan. Harga Bawang merah dan bawang putih mengalami kenaikan kisaran harga Rp 2.000,- hingga Rp 3.000,-. Sedangkan harga bahan pokok lainnya tidak mengalami kenaikan.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Komoditas kebutuhan pokok di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pemenuhan pasokan dari luar Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir kemudian pada Triwulan pertama (Bulan Januari-Maret) mengalami kelonjakan harga bahan kebutuhan pokok dikarenakan saat-saat menjelang Bulan Suci Ramadhan yang memiliki frekuensi cukup tinggi.

Klasifikasi permasalahan :

Ketersediaan pasokan :

- Perubahan cuaca yang mengganggu produksi pangan.

Keterjangkauan harga :

- Resiko gejolak harga menjelang Bulan Suci Ramadhan.
- Komoditas yang sering kali menjadi faktor utama inflasi sebagian besar berasal dari kelompok Volatile Foods, antara lain daging ayam dan telur ayam ras, cabai merah dan rawit. Komoditas-komoditas tersebut merupakan komoditas yang banyak dikonsumsi masyarakat, sehingga memiliki bobot yang besar terhadap perhitungan inflasi

Kelancaran Distribusi :

- Hampir sebagian besar kebutuhan pangan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir didatangkan dari luar Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sehingga kelancaran dalam distribusi sangat berpengaruh.
- Belum adanya Kerjasama Antar Daerah (KAD) ke daerah penghasil surplus.

Komunikasi efektif :

- Belum pahamnya sebagian masyarakat tentang pentingnya pengendalian inflasi perlu edukasi yang terus menurun.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan Program Kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada triwulan I 2026 sebagai berikut :

1.Rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir menggelar rapat koordinasi mengenai Program Kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang akan dilakukan untuk mengendalikan kestabilan dan keterjangkauan harga kebutuhan pokok masyarakat di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Rapat Koordinasi tersebut dipimpin oleh Sekda Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

2.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Operasi Pasar Murah (OPM) tanggal 15 Maret 2026. Satgas Pangan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir bersama Tim Teknis TPID Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir melakukan operasi pasar pada penjual di pasar untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga dan pasokan bahan pangan. Dalam operasi pasar tersebut harga cabai mulai mengalami penurunan sedikit demi sedikit. Selain itu juga bahan pangan lainnya dijual dengan harga stabil. Kegiatan ini bagian dari upaya mengantisipasi hal yang menjadi perhatian publik yaitu kenaikan harga pangan saat ini ataupun jika ada ketimpangan harga yang terjadi di pasar untuk kebutuhan pangan

3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan bersama Tim Pengedalian Inflasi Daerah (TPID) dan Kejari, Polri dan Dinas terkait melakukan pemantauan harga dan stok pada tanggal 12 Februari 2026, 16 Maret 2026 di pasar Talang Ubi juga pada tanggal 17 Maret 2026 di pasar Tanah Abang dalam rangka pemantauan ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok menjelang Bulan Suci Ramadhan.

4. Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) pada tanggal 13 Februari 2026 di terminal Talang Ubi dan tanggal 5 Maret 2026 di Balai Kantor Camat Tanah Abang.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada

triwulan I 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pentingnya penguatan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan koordinasi dengan dengan TPID Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dalam upaya pemenuhan kebutuhan dan menjaga kelancaran distribusi komoditas pangan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Kebutuhan akan inovasi dalam mendukung ketersediaan pangan sepanjang tahun dan kelancaran distribusi.
3. Menggalakan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ditanami seperti cabe, tomat, dan kebutuhan pokok lainnya sehingga dapat memenuhi kebutuhan komoditas pangan.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada triwulan I 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pemantauan harga dan ketersediaan pasokan komoditas pangan serta kelancaran distribusi yang
2. Melanjutkan dan meningkatkan koordinasi antar anggota TPID untuk menjaga ketersediaan pasokan dan kestabilan harga.
3. Pemerintah dan seluruh perangkat daerah untuk terus melakukan upaya konkrit dalam pengendalian inflasi di daerah dengan memperhatikan kebijakan program 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif).
4. Perlunya melakukan Kerjasama Antar Daerah (KAD).